

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI KECAMATAN SERENGAN
KOTA SURAKARTA BERDASARKAN TAHUN ANGGARAN 2021-2025**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) Program Studi Manajemen
Universitas Islam Batik Surakarta**

Disusun Oleh:

SUDARMININGSIH

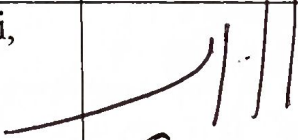
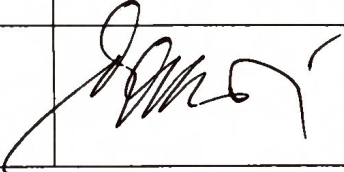
NIM : 2024P20059

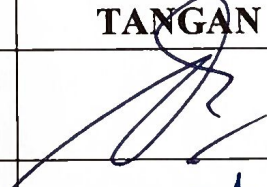
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

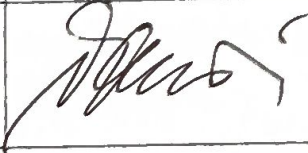
Nama : Sudarminingsih
NPM : 2024P20059
Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan Di Kecamatan Serengan Kota
Surakarta Berdasarkan Tahun Anggaran 2021 - 2025

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Kartika Hendra Ts, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA. (Pembimbing 1)		20/Agust . 2026
Dr. Supawi Pawenang, S.E., M.M. (Pembimbing 2)		21/8 2026

DISAHKAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Suhendro, S.E, Ak, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi)		21/8-2026
Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M. (Ka.Prodi Magister Manajemen)		21-8-2026
Tanggal Lulus	12 Agustus 2026	
Nomor Register	4038/KPTS/UT/MM UNIBA/VIII/2026	

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : Sudarminingsih
NPM : 2024P20059
Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan di Kecamatan Serengan Kota
Surakarta Berdasarkan Tahun Anggaran 2021 - 2025

TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Kartika Hendra Ts, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA. (Penguji 1)		20 Agustus 2024
Dr. Supawi Pawenang, S.E., M.M. (Penguji 2)		21/8 2024
Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M. (Penguji 3)		20-8-2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sudarminingsih

NPM : 2024P20059

Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan di Kecamatan Serengan Kota
Surakarta Berdasarkan Tahun Anggaran 2021-2025

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang diacu dalam naskah ini secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 12 Agustus 2026

Penulis

Sudarminingsih

SEPULUH RIBU RUPIAH
TOL 20
METERAI
TEMPEL
BEE7CAJX618888150

MOTTO

1. *“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.*
2. *“Segala sesuatu yang diawali dengan niat yang baik, akan memberikan hasil yang terbaik”.*
3. *“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiaallahu anhu)” .*
4. *“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS.Ar’Ra’d:11)*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya ini saya persembahkan kepada :

- a. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan hambanya di dunia.
- b. Ibu, anak-anak, dan suami saya yang senantiasa selalu mendoakan saya setiap hari tanpa henti.
- c. Keluarga besar dan rekan kerja yang senantiasa selalu mendukung dalam setiap hari dalam mengerjakan tesis ini.
- d. Teman-teman seperjuangan yang selalu memotivasi dalam melakukan pengerjaan tesis.
- e. Dan orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.

KATA PENGANTAR

Segala ucapan puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan judul: **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN TAHUN ANGGARAN 2021–2025**. Penulis berusaha yang terbaik agar penulisan tesis ini dapat di pahami dengan mudah oleh para pembaca sehingga dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Tesis ini dapat terselesaikan karena dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak/Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Rektor dan Dekan Falkutas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Keluarga tercinta yang memberikan dukungan moral dan material tanpa henti.
4. Rekan–rekan dan sahabat yang telah memberi semangat, motivasi yang membangun untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam bentuk apapun demi terselesainya tesis ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberi balasan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan, demi perbaikan di masa yang akan datang. Karena manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan dan Maha segalanya.

Surakarta, September 2026

Penulis,

Sudarminigsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI DAB HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Penganggaran Publik.....	8
2. Kinerja Keuangan	10
3. Keuangan Daerah.....	15
4. Perencanaan Anggaran.....	17
5. Anggaran Kas.....	19
6. Tingkat Serapan Anggaran	23

7. Tingkat Penilaian Kinerja	26
8. Tingkat Pengembalian Anggaran.....	28
B. Penelitian Terdahulu	32
1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan	32
2. Pengaruh Anggaran Kas Terhadap Kinerja Keuangan	33
3. Pengaruh Tingkat Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja	33
4. Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan	34
5. Pengaruh Tingkat Pengembalian Anggaran Terhadap Kinerja.....	35
C. Kerangka Konseptual Penelitian	36
D. Hipotesa	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian.....	41
B. Definisi Penelitian dan Pengukuran Variabel	43
C. Rencana Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	52
B. Hasil Analisis Data	54
C. Pembahasan.....	71
D. Keterbatasan Penelitian.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Implikasi	78
C. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskripsi	54
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalisasi.....	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas (<i>Variance Inflation Factor</i>).....	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi (<i>Durbin-Watson</i>)	62
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	66
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel matrik penelitian terdahulu

Lampiran 2. Data Variabel

Lampiran 3. Analisis Data

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of budget planning, the percentage of cash budgets in compliance with regulations, the level of budget absorption, institutional performance assessment, and the level of budget return on financial performance in Serengan Sub-District, Surakarta City, for fiscal years 2021–2025. The background of this research is based on the condition of sub-district financial management that has not demonstrated optimal effectiveness and efficiency, characterized by misalignment between planned activities and budget allocations, delays in activity realization, and inconsistent use of financial performance indicators. This study employs a quantitative approach using secondary data derived from the Budget Implementation Documents (DPA) and financial reports of Serengan Sub-District for the 2021–2025 period. The analytical method used is multiple linear regression, supplemented by classical assumption tests including residual normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. The results of this study indicate that Budget planning has a significant negative effect on financial performance, Cash budget has a significant positive effect on financial performance, The level of budget absorption has a significant positive effect on financial performance, Institutional performance assessment does not have a significant effect on financial performance and The level of budget return (SiLPA) has a significant positive effect on financial performance. This study concludes that optimizing cash budget management and improving budget absorption evenly throughout the fiscal year are key factors in enhancing sub-district financial performance. It is recommended that Serengan Sub-District strengthen the quality of cash budget preparation, improve the competency of financial management human resources, and more substantively integrate performance assessment results into the subsequent budget planning cycle.

Keywords: *Financial Performance, Budget Planning, Cash Budget, Budget Absorption, Performance Assessment, SiLPA, Serengan Sub-District.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, prosentase anggaran kas yang sesuai aturan, tingkat penyerapan anggaran, penilaian kinerja instansi, dan tingkat pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta pada tahun anggaran 2021–2025. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi pengelolaan keuangan kecamatan yang belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi secara optimal, yang ditandai oleh ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan alokasi anggaran, keterlambatan realisasi kegiatan, serta belum konsistennya penggunaan indikator kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan keuangan Kecamatan Serengan periode 2021–2025. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dilengkapi dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, Anggaran kas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, Tingkat penyerapan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, Penilaian kinerja instansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan Tingkat pengembalian anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi anggaran kas dan peningkatan penyerapan anggaran secara merata sepanjang tahun merupakan faktor kunci dalam peningkatan kinerja keuangan kecamatan. Disarankan agar Kecamatan Serengan memperkuat kualitas penyusunan anggaran kas, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, dan mengintegrasikan hasil penilaian kinerja secara lebih substantif ke dalam siklus perencanaan anggaran berikutnya.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Perencanaan Anggaran, Anggaran Kas, Penyerapan Anggaran, Penilaian Kinerja, SiLPA, Kecamatan Serengan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan anggaran merupakan proses awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perumusan rencana belanja, penentuan prioritas program, serta pengalokasian sumber daya. Perencanaan anggaran yang tepat dan sistematis berperan penting dalam mengarahkan penggunaan sumber daya secara efektif, serta menjadi alat pengendalian dalam pencapaian tujuan usaha (Suwono, 2024). Perencanaan anggaran bertujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya publik secara lebih terukur, terencana, dan fokus pada hasil yang ingin dicapai, bukan sekadar pada jumlah anggaran yang digunakan (Julianti *et al.*, 2025).

Dokumen Perencanaan yang telah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), selanjutnya harus dijabarkan ke dalam anggaran kas sebagai instrumen pengendalian arus keluar dan masuk kas pemerintah daerah dan berfungsi untuk menjamin ketersediaan dana guna mendanai kegiatan secara tepat waktu. Ketidaktepatan dalam penyusunan anggaran kas dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang akhirnya akan menghambat realisasi belanja (Indriani *et al.*, 2025). Prosentase anggaran kas yang sesuai aturan mencerminkan sejauh mana kecamatan merencanakan dan merealisasikan arus kas berdasarkan pedoman yang ditetapkan

Tingkat penyerapan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan. Realisasi anggaran tidak hanya menunjukkan efisiensi

pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah (Rahayuningsih & Syaflan, 2023). Serapan anggaran yang rendah mencerminkan perencanaan yang kurang matang atau hambatan dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, penyerapan yang tinggi namun tidak efektif juga dapat memunculkan potensi pemborosan anggaran. Menurut Andi Suci Patiwi Hasan, (2024) Ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan lapangan, serta rendahnya daya serap anggaran menjadi tantangan yang masih harus diatasi.

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana anggaran digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mendukung program kerja pemerintah adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja keuangan menjadi sangat penting tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan (Nansi *et al.*, 2025). penilaian kinerja keuangan tidak hanya penting sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, tetapi juga sebagai dasar untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan keuangan (Widiatmoko, 2025). Penilaian ini biasanya dilakukan oleh instansi pembina atau pengawas seperti Inspektorat atau melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tingkat pengembalian anggaran atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencerminkan jumlah anggaran yang tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran. Tingkat pengembalian anggaran yang besar secara terus-menerus dapat mengindikasikan bahwa anggaran yang telah direncanakan tidak digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang pada akhirnya

berdampak pada rendahnya kinerja keuangan secara keseluruhan (Fitriani & Syarif, 2025). Semakin tinggi nilai anggaran yang tidak terserap atau harus dikembalikan, semakin menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan kecamatan secara keseluruhan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan suatu instansi dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kinerja ini tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh rangkaian proses pengelolaan anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran yang matang, karena tanpa perencanaan yang realistis dan terukur, pelaksanaan anggaran akan sulit mencapai hasil optimal. Selanjutnya, anggaran kas menentukan kelancaran arus kas untuk membiayai program secara tepat waktu, sehingga mencegah keterlambatan kegiatan dan penumpukan belanja di akhir tahun. Tingkat penyerapan anggaran menjadi indikator langsung dari efektivitas pelaksanaan anggaran, di mana serapan yang rendah mencerminkan lemahnya implementasi, sedangkan serapan yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara rencana dan realisasi. Di sisi lain, penilaian kinerja berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, tingkat pengembalian anggaran atau sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) menunjukkan seberapa besar dana tidak digunakan, yang apabila terlalu tinggi justru mengindikasikan rendahnya efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, kombinasi dari kelima variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi

kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Jurnal Kajian Pemerintah (2024) tentang akuntabilitas dan pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Astuti *et al.*, 2024) , serta diperkuat oleh studi Jasmien (2025) yang menilai rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah dalam menentukan kualitas kinerja pengelolaan anggaran (Remanta *et al.*, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari perencanaan anggaran, prosentase anggaran kas yang sesuai aturan, tingkat penyerapan anggaran, penilaian kinerja instansi, dan tingkat pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan Kecamatan Serengan tahun anggaran 2021-2025.

B. Identifikasi Masalah

Kinerja keuangan di tingkat Kecamatan Serengan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Namun, berdasarkan kondisi selama periode 2021–2025, pengelolaan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi secara optimal.

Beberapa indikasi seperti masih terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia, penjadwalan pencairan dana belum disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi kegiatan, realisasi belanja sering tidak mencapai target yang ditetapkan setiap bulan anggaran, belum semua indikator kinerja keuangan digunakan secara konsisten untuk mengukur efektivitas

pelaksanaan anggaran serta yang kemudian menunjukkan menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum berjalan selaras dengan kebutuhan program kerja agar dapat menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat kecamatan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah prosentase anggaran kas yang sesuai aturan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah tingkat penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah penilaian kinerja instansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah tingkat pengembalian anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, maka dikemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Secara teoritis banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, namun pada penelitian ini peneliti membatasi pada variabel perencanaan anggaran, prosentase anggaran kas yang sesuai aturan, tingkat penyerapan anggaran, penilaian kinerja dan tingkat pengembalian anggaran.
2. Periode yang diteliti adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan melihat laporan keuangan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh prosentase anggaran kas yang sesuai aturan terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
3. Menganalisis pengaruh tingkat penyerapan anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
4. Menganalisis pengaruh penilaian kinerja instansi terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
5. Menganalisis pengaruh tingkat pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pengaruh pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sehingga dapat menimbulkan peningkatan kinerja keuangan penyerapan anggaran yang lebih baik di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

b. Bagi Pegawai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pegawai untuk memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan Peningkatan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintahan tingkat kecamatan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Penganggaran Publik

a. Pengertian Penganggaran Publik

Penganggaran publik merupakan proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Proses ini mencerminkan kebijakan publik dan menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Mardiasmo (2021), penganggaran publik bukan sekadar proses teknis, tetapi juga merupakan proses politik, karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

b. Tujuan Penganggaran Publik

- 1) Menyediakan pedoman pembelanjaan negara/daerah;
- 2) Menyelaraskan antara pendapatan dan belanja;
- 3) Menjamin akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Menjadi alat untuk distribusi dan stabilisasi ekonomi.

c. Beberapa pendekatan teori penganggaran publik yang banyak digunakan dan relevan dengan penelitian, antara lain :

1) *Incremental Budgeting Theory*

Teori ini berasumsi bahwa penganggaran dilakukan dengan penyesuaian kecil dari anggaran tahun sebelumnya, tanpa perubahan

besar. Menurut Suaib *et al.* (2022), ini adalah metode paling umum karena lebih realistis secara politis dan administratif.

2) *Performance-Based Budgeting* (PBB)

Menekankan hubungan antara alokasi anggaran dengan kinerja. Pemerintah harus menunjukkan output atau outcome yang dihasilkan dari dana yang digunakan. Teori ini banyak dipakai dalam era reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3) *Zero-Based Budgeting* (ZBB)

Dalam pendekatan ini, setiap kegiatan harus dijustifikasi dari nol tanpa mengacu pada anggaran sebelumnya. Teori ini bertujuan untuk efisiensi dan penghapusan kegiatan yang tidak produktif.

d. Siklus dan Proses Penganggaran Publik

Proses penganggaran terdiri dari beberapa tahap: perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di Indonesia, siklus ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa teori-teori penganggaran publik seperti *incremental budgeting*, *performance-based budgeting*, hingga *public choice theory* telah banyak dibahas dan diterapkan dalam konteks pengelolaan anggaran secara umum ditingkat nasional maupun daerah.

2. Kinerja Keuangan

a. Pengertian kinerja keuangan

Pengertian kinerja keuangan menurut Desember *et al.*, (2024) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif organisasi dalam menghasilkan laba serta mengelola sumber daya finansialnya. Kinerja tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek.

Menurut Nadeya *et al.*, (2023) mengatakan kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti mendefinisikan kinerja keuangan merupakan gambaran sejauh mana suatu unit organisasi, dalam hal ini kecamatan, mampu mengelola anggaran yang dialokasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pelayanan publik serta pembangunan daerah. Kinerja ini dapat diukur melalui indikator seperti tingkat realisasi anggaran, efisiensi belanja, kesesuaian antara rencana dan realisasi keuangan, serta ketepatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

b. Pengertian Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai peta strategis bagi perusahaan, yang membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis anggaran yang umum digunakan dalam praktik bisnis menurut Desember *et al.*, (2025), di antaranya:

- a) **Anggaran Operasi:** Anggaran ini merinci semua rencana keuangan yang terkait dengan operasi sehari-hari, termasuk pendapatan yang diharapkan penjualan serta semua biaya yang terkait dengan produksi distribusi barang atau jasa. Anggaran operasi biasanya disusun secara berkala tahunan dan menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan.
- b) **Anggaran Kas:** Ini adalah proyeksi aliran kas keluar dan masuk, yang terpenting untuk menjaga likuiditas. Anggaran kas membantu manajemen merencanakan kebutuhan dana untuk memenuhi kewajiban berjangka pendek dan memastikan bahwa perusahaan tidak mengalami kekurangan kas.
- c) **Anggaran Modal:** Anggaran ini berkaitan dengan perencanaan investasi berjangka panjang dalam asset tetap, seperti peralatan dan fasilitas produksi. Proses penyusunan anggaran modal mencakup analisis kelayakan investasi yang membantu perusahaan menentukan proyek mana yang akan memberikan imbal balik hasil terbaik dalam jangka panjang.
- d) **Anggaran Strategis:** Merupakan rencana yang lebih luas, mencakup tujuan jangka panjang dan cara mencapai tujuan tersebut. Anggaran ini

biasanya berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga memberikan arahan bagi semua unit organisasi.

Anggaran menurut Widyawati *et al.*, (2025) dapat menjadi pegangan yang penting bagi pimpinan organisasi dalam memberikan dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kemajuan organisasi. Anggaran juga dapat menjadi alat koordinasi dalam pelaksanaan rencana kegiatan setiap bagian organisasi sehingga perencanaan yang dihasilkan merupakan rencana perusahaan secara keseluruhan yang terpadu dan terperinci. Selain itu anggaran juga berfungsi dalam mengarahkan seluruh kegiatan kearah pencapaian laba organisasi dan mendorong para pelaksana untuk melakukan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

Terdapat beberapa peranan anggaran dalam mengendalikan kinerja organisasi, yaitu:

a) Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian

Anggaran memberikan pedoman bagi perusahaan untuk mempertahankan arah kegiatan menuju tujuan yang telah direncanakan.

b) Sebagai Alat Evaluasi

Anggaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan.

c) Sebagai Alat Komunikasi

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antar departemen.

d) Sebagai Alat untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi biaya

Anggaran memberikan gambaran yang jelas tentang pengeluaran yang diharapkan.

e) Sebagai Alat untuk Merencanakan Pendapatan

Anggaran memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pendapatan dengan lebih terstruktur.

f) Sebagai Alat untuk Mengalokasikan Sumber Daya

Anggaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Dengan memahami dan memanfaatkan informasi suatu anggaran dengan baik maka manajer dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan akurat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan.

c. Hubungan Kinerja Keuangan dan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hal positif yang signifikan antara penyusunan anggaran yang efektif dan peningkatan kinerja keuangan. Organisasi yang menerapkan system perencanaan anggaran yang baik dan terstruktur cenderung menunjukkan hasil keuangan yang baik. Ini dikarenakan penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh pihak dapat meningkatkan akuntabilitas, membuat keputusan lebih responsif terhadap kondisi pasar, dan meminimalkan risiko. Penyusunan anggaran merupakan

proses penting dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan penggunaan sumber daya. Anggaran didefinisikan sebagai rencana formal yang mengestimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode yang sudah ditentukan.

Anggaran menurut Widyawati *et al.*, (2025) merupakan alat perencanaan (*planning*) sekaligus alat pengendalian (*controlling*). Perencanaan adalah melihat kedepan, menentukan tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan. Pengendalian adalah melihat kebelakang, menentukan yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan. Disini anggaran memiliki peran kunci dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Proses penyusunan anggaran merupakan proses negosiasi antara manajer tingkat bawah atau manajer pusat pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran bisa menggunakan metode *top-down* atau *bottom-up* bahkan dengan menggunakan keduanya secara bersama-sama. Dengan menggunakan metode *top-down* manajer tingkat atas menetapkan anggaran bagi manajer tingkat bawahnya. Untuk melukiskan anggaran dan proses penyusunan anggaran (Widyawati *et al.*, 2025).

Anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumberdaya yang diperkirakan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya perusahaan ke suatu kondisi tertentu. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana jangka

pendek, yang dalam perusahaan berorientasi laba, pemilihan rencana didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba.

Oleh karena itu sering sekali proses penyusunan anggaran sering sekali disebut sebagai penyusunan rencana laba jangka panjang (short-run profit planning). Untuk memungkinkan manajemen puncak melakukan pemilihan rencana kerja yang berdampak baik terhadap laba, manajemen menggunakan teknik analisis biaya-volume dan laba. Dalam analisis biaya-volume dan laba ini, informasi akuntansi diferensial memungkinkan manajemen untuk melakukan pemilihan berbagai alternatif kerja yang akan dicantumkan dalam anggaran. Setelah suatu rencana kerja dipilih untuk mencapai sasaran anggaran, manajer yang berperan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut memerlukan sumberdaya, untuk memungkinkannya mencapai sasaran anggaran.

Dari definisi diatas anggaran menurut penulis adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam periode tertentu yang mencerminkan estimasi belanja, serta menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan sumber daya organisasi.

3. Keuangan Daerah

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada tingkat Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), sebagai pelaksana fungsi pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran dapat diukur melalui penyerapan belanja yang dialokasikan kepada SKPD berdasarkan peraturan daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Faktor utama yang memengaruhi penyerapan anggaran meliputi pengelolaan anggaran kas, penatausahaan belanja, serta kepatuhan pengelolaan keuangan.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah menurut Maharaini (2024) adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Pengelola keuangan, baik individu maupun entitas, memiliki tanggung jawab utama dalam realisasi penyerapan anggaran belanja. Kepatuhan pengelola keuangan OPD sangat dipengaruhi oleh komitmen Indriani *et al.*, (2025), pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha supaya program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan anggaran belanja yang efektif dan efisien untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target tujuan yang telah ditetapkan, serta ketepatan kegiatan sesuai jadwal

yang telah ditentukan, sangat memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Salah satu tugas pengelola keuangan ialah memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memastikan bahwa setiap pos-pos pengeluaran mencerminkan prioritas dan tujuan yang telah disepakati.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan institusional yang kompleks dalam pengelolaan, pengalokasian, serta optimalisasi sumber daya finansial secara terarah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pemerintah daerah dengan tata kelola keuangan yang kuat umumnya mampu membangun kemandirian fiskal berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu faktor kunci penentu kinerja ini adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif (Widiatmoko, 2025).

4. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran sektor publik menurut Julianti (2025) terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, maka organisasi sektor publik harus menerapkan asas transparansi.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam ranah teori perencanaan anggaran, konsep ini merangkum suatu pendekatan terstruktur yang digunakan organisasi untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif. Proses dimulai dengan penetapan tujuan keuangan yang jelas, dimana organisasi menentukan target yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Pada tahap selanjutnya, organisasi melakukan identifikasi dan estimasi sumber-sumber pendapatan yang akan diterima. Hal ini melibatkan penilaian mendalam terhadap potensi penerimaan dari berbagai sumber, baik itu penjualan, investasi, atau bentuk pendapatan lainnya. Sejalan dengan itu, pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut juga diidentifikasi dan diperkirakan secara cermat (Suwono, 2024).

Inti dari teori perencanaan anggaran adalah proses alokasi sumber daya keuangan. Organisasi harus membuat keputusan cerdas tentang cara terbaik untuk mengalokasikan dana yang ada agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan pengaturan anggaran untuk berbagai keperluan seperti operasional, investasi, pemasaran, dan pengembangan. Dengan adanya teori perencanaan anggaran, organisasi diharapkan dapat menyusun suatu rencana keuangan yang kokoh,

mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial, dan secara konsisten mencapai tujuan keuangan mereka. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini membantu organisasi menghadapi dinamika ekonomi dan mengambil keputusan strategis yang tepat guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan mereka.

Dari definisi diatas perencanaan anggran menurut penulis adalah proses sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi, dalam hal ini kecamatan, untuk menyusun rencana belanja dalam periode tertentu, berdasarkan pada kebutuhan, prioritas program, serta ketersediaan sumber daya.

5. Anggaran Kas

a. Pengertian Anggaran Kas

Anggaran kas menurut Viroza *et al.*, (2025) merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu entitas. Pengelolaan anggaran kas yang optimal dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana, mencegah defisit keuangan, serta mendukung stabilitas operasional jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan maupun bisnis, penyusunan anggaran kas harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti kebijakan ekonomi, tingkat inflasi, serta pola arus kas perusahaan. Pengelolaan kas yang baik juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau arus kas secara real-time sehingga dapat meminimalisir risiko keuangan yang tidak terduga (Viroza *et al.*, 2025).

Anggaran Kas menurut Indriani *et al.*, (2025) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Dengan proyeksi arus kas masuk ini, pemerintah daerah dapat merencanakan pengeluaran kas untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun dalam APBD. SKPD kemudian menyusun anggaran kas berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang telah ditentukan. Penyusunan anggaran kas dilakukan dengan perhitungan dan jadwal yang terencana, bertujuan untuk mengelola risiko keuangan, seperti memastikan pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan tepat waktu guna menghindari peningkatan utang belanja.

b. Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Anggaran Kas

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan optimalisasi anggaran kas dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan menurut Viroza *et al.*, (2025), di antaranya:

1) Perencanaan Keuangan yang Sistematis

Berdasarkan Modul Penganggaran Bisnis (2024), perusahaan yang memiliki sistem perencanaan anggaran yang baik dapat mengantisipasi ketidakseimbangan arus kas dan mencegah potensi defisit keuangan. Perencanaan yang matang memungkinkan perusahaan

untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif serta menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan yang tersedia.

2) Pengendalian Biaya yang Ketat

Menerapkan sistem pengendalian biaya yang ketat mampu mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Pengendalian biaya juga dapat membantu organisasi dalam menetapkan skala prioritas pengeluaran, sehingga dana kas yang tersedia dapat dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak dan produktif.

3) Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Kas

Penerapan sistem keuangan berbasis teknologi mampu meningkatkan akurasi data keuangan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem digital dalam pencatatan kas, perusahaan dapat memantau arus kas secara real-time dan mengidentifikasi potensi masalah keuangan sebelum menjadi krisis.

4) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Manajemen Kas

Pentingnya peningkatan kompetensi SDM dalam bidang keuangan sebagai faktor utama dalam optimalisasi anggaran kas. Pengelolaan kas yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada keahlian individu dalam menganalisis laporan keuangan dan mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang tersedia.

5) Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Anggaran Kas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kas memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan.

c. Dampak Optimalisasi Anggaran Kas terhadap Stabilitas Keuangan

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa optimalisasi anggaran kas memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Seperti yang ditemukan oleh Bagas Pratama & Susilowati (2024), perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan kas yang optimal cenderung memiliki likuiditas yang lebih stabil. Dengan adanya likuiditas yang sehat, perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya tanpa harus bergantung pada pinjaman eksternal, yang pada akhirnya akan mengurangi beban bunga dan meningkatkan profitabilitas. Sistem manajemen keuangan berbasis digital mengalami peningkatan stabilitas kas yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang masih menggunakan metode manual dalam pencatatan dan pengelolaan kas.

d. Strategi Optimalisasi Anggaran Kas

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam optimalisasi anggaran kas, yaitu:

- 1) Organisasi dan perusahaan perlu menerapkan sistem perencanaan keuangan yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sudah dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan kebutuhan prioritas.

- 2) Penggunaan sistem keuangan berbasis teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kas secara lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan, serta meningkatkan efisiensi operasional.
- 3) Pelatihan dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan sangat diperlukan agar individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas memiliki kemampuan analisis yang baik serta dapat mengambil keputusan berdasarkan data keuangan yang tersedia.
- 4) Perusahaan perlu menerapkan sistem kontrol biaya yang lebih ketat untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu serta memastikan bahwa anggaran kas yang tersedia dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien

Dari definisi diatas presentase anggaran kas menurut penulis adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah realisasi pengeluaran kas dengan total anggaran yang telah direncanakan dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

6. Tingkat Serapan Anggaran

a. Serapan Anggaran

Suci *et al.*, (2024) mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Didalam lingkungan instansi pemerintah salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah

penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran.

Menurut Hasni dan Basukianto faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi, dan proses pencairan dana. Hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja keuangan suatu organisasi dapat sangat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan operasionalnya. Penyerapan anggaran yang baik dapat mengarah pada optimalisasi penggunaan sumber daya. Organisasi dapat mengalokasikan anggaran dengan cerdas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan proyek strategis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi. Proses penyerapan anggaran yang efisien dapat mencerminkan efisiensi operasional. Ketika dana dialokasikan dengan baik, organisasi cenderung mencapai tujuan operasionalnya dengan lebih baik. Penyerapan anggaran yang transparan dan akurat menciptakan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi. Manajemen yang baik dalam penyerapan anggaran akan lebih mudah dipertanggungjawabkan terhadap pemangku kepentingan dan otoritas pengawas.

Penyerapan anggaran merujuk pada realisasi penggunaan belanja daerah untuk mendukung program serta kegiatan yang dirancang setiap OPD, sebagaimana diatur dalam tahun anggaran yang berjalan. Tingkat penyerapan anggaran mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan, seperti peningkatan layanan publik, pembangunan

infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, rendahnya tingkat penyerapan anggaran menjadi isu yang berulang di berbagai daerah di Indonesia. Idealnya, anggaran terserap 15% pada triwulan I, 45% pada triwulan II, 80% pada triwulan III, dan mencapai 100% pada akhir tahun.

b. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menurut Tri *et al.*, (2025) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai alokasi, ringkasan sumber, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini berfungsi untuk membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaannya dalam periode tertentu. Laporan realisasi anggaran ini sangat penting dilakukan karena hal tersebut dapat menilai kualitas dari suatu entitas apakah entitas tersebut melakukan pemborosan atau malah menghemat anggaran yang telah dikeluarkan. Pada dasarnya tujuan dari adanya laporan realisasi anggran ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sektor publik kepada masyarakat atas pemakaian anggran yang telah ditetapkan, karena yang akan melihat adalah semua lapisan masyarakat maka laporan harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami karena sesuai dengan prinsip , bahwa organisasi sektor publik harus memiliki sifat transparan .

Analisis laporan keuangan ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah cara memahami laporan keuangan. Melalui analisis laporan keuangan, suatu entitas dapat dengan mudah memahami kondisi keuangannya, yang kemudian dapat digunakan untuk menilai kinerja

manajemen dalam mengelola anggaran apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau justru melebihi target yang ditetapkan Tri *et al.*, (2025). Sementara itu, analisis laporan keuangan merupakan proses menguraikan data dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap elemen, serta mempelajari hubungan antar komponen dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar dapat memperoleh pemahaman yang kuat dan akurat.

Laporan realisasi serapan anggaran memberikan gambaran kepada entitas publik mengenai sejauh mana penggunaan anggaran yang telah disetujui sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, kewajiban entitas sektor publik dalam menyusun laporan ini berperan penting dalam mengevaluasi aspek efisiensi ekonomi, kepatuhan, serta tanggung jawab terhadap ketentuan anggaran. Hasil dari laporan realisasi anggaran nantinya akan dicatat dalam neraca dana ekuitas yang tersedia. Seluruh laporan yang disusun mengikuti prinsip akuntansi pemerintahan (Tri Handayani *et al.*, 2025).

Dari definisi diatas tingkat serapan anggaran menurut penulis adalah persentase realisasi belanja atau pengeluaran anggaran dibandingkan dengan total anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode anggaran.

7. Tingkat Penilaian Kinerja

a. Penilaian Kinerja

Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah menurut Nensi *et al.*, (2025) adalah dengan melakukan analisis kinerja

keuangan. Menurut Restiana *et al.*, (2024) analisis kinerja keuangan merupakan bagian penting dalam analisis laporan keuangan dan analisis harus dilakukan secara cermat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui berbagai rasio keuangan yang memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana dengan baik. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih mendalam, perlu adanya perbandingan hasil perhitungan rasio keuangan pada beberapa tahun terakhir. Rasio keuangan dapat ditentukan dengan membandingkan antara suatu entitas dalam laporan keuangan dengan entitas lainnya.

b. Tingkat Penilaian Kinerja

Prestasi kinerja suatu pemerintah daerah dapat diukur dengan mempertimbangkan unsur kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas dari setiap program dan kegiatan operasional yang dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan daerah. Sedangkan menurut Nensi *et al.*, (2025) evaluasi kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk yang dilakukan pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban kepada para pengguna dana dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

c. Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja keuangan memiliki sejumlah manfaat strategis. Pertama, berfungsi sebagai alat evaluasi tingkat keberhasilan implementasi efektivitas dan efisiensi penganggaran. Kedua, esensi dari tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab terletak pada penguatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang solid. Ketiga, menjadi mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran dengan regulasi yang berlaku (Widiatmoko, 2025).

Dari definisi diatas tingkat penilaian kinerja menurut penulis adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi atau unit kerja, seperti kecamatan, berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja yang terukur.

8. Tingkat Pengembalian Anggaran

a. Pengertian Pengembalian Anggaran (SiLPA)

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dimana dalam penyusunan APBD angka SiLPA seharusnya sama dengan nol, yang artinya bahwa pembiayaan pendapatan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), SiLPA merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode anggaran. Artinya SiLPA adalah uang sisa dari anggaran pemerintah daerah yang belum terpakai pada akhir tahun anggaran. SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada

tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu SiLPA perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD. SiLPA menjadi salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana SiLPA yang besar dapat mengindikasikan adanya keridaktepatan dalam perencanaan anggaran atau lambatnya pelaksanaan kegiatan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Chasanah & Handayani (2025) didefinisikan sebagai selisih positif antara realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu entitas pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Dengan kata lain, SiLPA mepresentasikan surplus kas yang timbul akibat pendapatan daerah yang melebihi belanja daerah pada periode tersebut. Besar kecilnya SiLPA secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah. Jika terdapat efisiensi belanja atau realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan, maka potensi terjadinya SiLPA yang lebih besar akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika realisasi belanja melebihi anggaran, maka SiLPA yang diperoleh akan lebih kecil atau bahkan dapat berujung pada defisit. Dalam kondisi defisit, entitas pemerintah daerah tidak akan memiliki SiLPA, melainkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yang mengindikasikan adanya kekurangan pembiayaan.

b. Tingkat Pengembalian Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih positif antara total penerimaan dan total pengeluaran dalam suatu periode anggaran tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan

daerah, yang muncul akibat surplus Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta adanya pembiayaan netto yang melebihi pengeluaran pembiayaan. SiLPA dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Dalam penelitian ini, data SiLPA yang digunakan merupakan angka realisasi SiLPA yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Chasanah & Handayani, 2025).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengukuhkan posisi SiLPA sebagai salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kondisi di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan desifit, SiLPA dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif selain dana cadangan, hasil penjualan aset daerah dan pinjaman.

SiLPA yang tinggi dapat menjadi perhatian serius karena mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan negara. Perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, pengawasan yang lemah, dan ketidakmampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien dapat menyebabkan peningkatan SiLPA. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Nurullah *et al.*, 2025).

c. Faktor Penyebab Pengembalian Anggaran

Salah satu penyebab utama SiLPA adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja, yang seringkali diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas, rotasi pejabat yang tinggi, dan beban kerja yang berlebihan. Selain itu, dinamika pelaksanaan anggaran seperti penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tengah tahun, perubahan regulasi dan kendala dalam proses lelang juga turut berkontribusi terhadap terjadinya SiLPA. Kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk menunda realisasi belanja hingga akhir tahun, terutama untuk belanja modal, yang dapat memperburuk permasalahan SiLPA.

Surplus/defisit anggaran akan dialokasikan dalam pos pembiayaan. Apabila terjadi surplus, maka kelebihan dana tersebut akan dialokasikan pada pos pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pengembalian utang jangka panjang, atau pemberian pinjaman daerah. Sebaliknya jika terjadi Defisit, maka untuk menutup kekurangan dana tersebut akan diambilkan dari pos pembiayaan, yaitu dari penggunaan SiLPA, penggunaan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, pengadaan pinjaman dan penagihan piutang daerah. Selisih antar penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang menunjukkan jumlah bersih pembiayaan. Penjumlahan Surplus/Defisit anggaran dengan pembiayaan netto akan menghasilkan SiLPA. Jika dianalogikan dengan Laporan Laba-Rugi, maka SiLPA mirip dengan Laba/Rugi bersih. SiLPA yang terjadi akan

mempengaruhi neraca yaitu menambah ekuitas dana lancar, sedangkan apabila terjadi SiKPA maka akan mengurangi ekuitas dana lancar (Putri & Ratnawati, 2023).

Dari definisi diatas tingkat pengembalian anggaran menurut penulis adalah besaran atau persentase dana yang tidak terserap atau tidak digunakan oleh suatu unit kerja dalam periode anggaran tertentu, yang kemudian dikembalikan ke kas daerah.

B. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh perencanaan anggran terhadap kinerja keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Julianti *et al.*, (2025) menyoroti implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Keuangan. Rahmawati *et al.*, (2024) meneliti pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi perencanaan anggaran berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Selanjutnya Suwono (2024) dalam penelitiannya yang berfokus pada UMKM di Kabupaten Cilacap, mengkaji pengaruh profitabilitas dan perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM.

2. Pengaruh anggaran kas terhadap kinerja keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani *et al.*, (2025) bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran kas, pelaksanaan penatausahaan belanja, dan kepatuhan pengelola keuangan SKPD terhadap penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel independen anggaran kas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

Desember *et al.*, (2024) meneliti pada PT Indofood Tbk selama periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan anggaran kas yang baik tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja finansial perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya Viroza *et al.*, (2025) meneliti pentingnya perencanaan kas yang tepat dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan suatu entitas. Hasil penelitian menunjukkan Optimalisasi anggaran kas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di berbagai sektor.

3. Pengaruh tingkat penyerapan anggaran terhadap kinerja keuangan

Penelitian Rahayuningsih dan Syaflan (2024) meneliti pentingnya capaian realisasi anggaran sebagai indikator dalam mengukur kinerja keuangan instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh cukup efisien dan sangat efektif terhadap kinerja keuangan. Tri *et al.*, (2025) meneliti pada DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap laporan realisasi

anggaran yang telah dikeluarkan maka hasil kinerja keuangan dinilai cukup baik.

Suci *et al.*, (2024) meneliti Kinerja Keuangan PT PLN (Persero) Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable penyerapan anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Cahyaningrum & Mumpuni (2024) meneliti pada Kantor Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran secara keseluruhan berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata persentase. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nadeya *et al.*, (2023) pada analisis realisasi anggaran belanja dalam mengukur kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Gedeg selama periode 2017–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh cukup efisien dan sangat efektif terhadap kinerja keuangan.

4. Pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja keuangan (Riesdi, 2024)

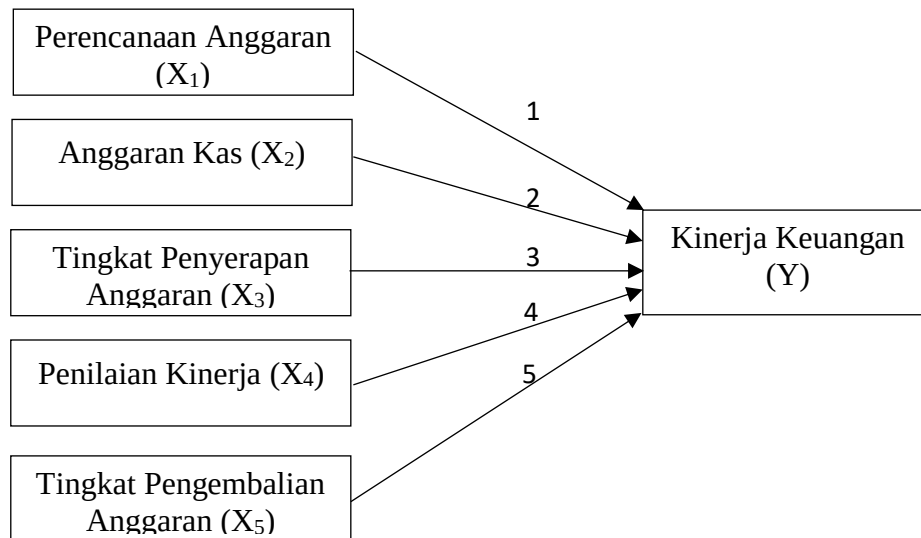
Penelitian yang dilakukan oleh Riesdi (2024) meneliti pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode 2018 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja cukup efektif terhadap kinerja keuangan. Nensi *et al.*, (2024) meneliti pada penggunaan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasilnya kinerja keuangan menunjukkan kemajuan yang positif dan signifikan. Selanjutnya Widiatmoko (2025) meneliti pada kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Jawa Tengah selama periode 2019

hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

5. Pengaruh tingkat pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan

Penelitian oleh Fitriani dan Syarif (2025) meneliti pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian anggaran menunjukkan hasil positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Maulidha dan Nur (2025) meneliti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pramestya dan Dyah (2023) meneliti pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Selanjutnya Nurullah *et al.*, (2025) meneliti pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

C. Kerangka Konseptual Peneliti



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

1. Suwono (2024), Julianti (2025), (Rahmawati *et al.*, 2024)
2. Indriani *et al.*, 2025), Desember *et al.*, (2024), Viroza *et al.*, (2025), (Isaac *et al.*, 2023)
3. Rahayuningsih & Syaflan (2024), Tri *et al.*, (2025), Suci *et al.*, (2024), Cahyaningrum & Sitoresmi (2025), Nadeya *et al.*, (2023), (Hutagalung *et al.*, 2024)
4. Riesdi (2024), Nensi *et al.*, (2024), Widiatmoko (2025), Erica *et al.*, (2025)
5. Fitriani & Syarif (2025), Chasanah & Handayani (2025), Putri & Ratnawati (2023), Nurullah *et al.*, (2025), Situmorang *et al.*, (2025)

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka konseptual dan bebearapa hasil penelitian sebelumnya maka perumusan hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Suwono (2024) melakukan penelitian pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan menyatakan bahwa dapat dijelaskan perencanaan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Dalam artian Perencanaan anggaran tidak hanya menjadi alat untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan pada aspek-aspek kritis kinerja keuangan. Julianti (2025) menyatakan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan (Rahmawati *et al.*, 2024) menyatakan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Optimalisasi perencanaan anggaran berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

2. Pengaruh presentase anggaran kas terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Viroza *et al.*, (2025) mengemukakan hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi anggaran kas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di berbagai sektor, baik di sektor publik maupun swasta. Dapat dilihat bahwa optimalisasi anggaran kas memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan suatu organisasi

atau perusahaan. Indriani *et al.*, (2025) menyatakan bahwa anggaran kas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja serta kinerja keuangan. Mengindikasikan bahwa penyusunan anggaran kas yang baik oleh pemerintah daerah sangat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja. Isaac *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Anggaran kas yang efektif sangat diperlukan dalam organisasi milik pemerintah untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan Desember *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kas yang baik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah

H2 : Presentase anggaran kas berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

3. Pengaruh tingkat penyerapan anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Suci *et al.*, (2024) melakukan penelitian menyatakan bahwa nilai signifikansi untuk variable penyerapan anggaran adalah $0,000 < \text{dari } 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable penyerapan anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hutagalung *et al.*, (2024) menyatakan bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang didukung perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal. Cahyaningrum & Sitoresmi (2024)

menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran secara keseluruhan berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata persentase. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang dilakukan Tri *et al.*, (2025) dalam penelitiannya, setelah dilakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan maka hasil kinerja keuangan dinilai cukup baik.

Rahayuningsih & Syaflan (2024) dan Nadeya *et al.*, (2023) juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa penyerapan anggaran memiliki pengaruh cukup efisien dan sangat efektif terhadap kinerja keuangan. Dari hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:
H3 : Tingkat serapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

4. Pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja keuangan pernah diteliti oleh Nensi *et al.*, (2024) dan hasilnya kinerja keuangan menunjukkan kemajuan yang positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiatmoko (2025) di pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah didapat kesimpulan bahwa penilaian kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian Riesdi (2024) yang meneliti Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa penilaian kinerja cukup efektif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Erica *et al.*, (2024) meneliti pada Pemerintah Kabupaten Bogor terkait kinerja keuangan sektor publik menunjukkan bahwa penilaian

kinerja secara efektif menunjukkan kinerja keuangan yang baik jika penyerapan anggaran tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H4 : Tingkat penilaian kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

5. Pengaruh tingkat pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Pada penelitian Fitriani & Syarif (2025) menyatakan bahwa tingkat pengembalian anggaran menunjukan hasil positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah & Handayani (2025), Putri & Ratnawati (2023), Nurullah *et al.*, (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengembalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Situmorang *et al.*, (2025) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Tingginya sisa serapan anggaran selama pandemi berkontribusi langsung terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H5 : Tingkat pengembalian anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan alat penelitian serta analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

2. Lokasi dan Waktu

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Jl. Veteran No. 271 Surakarta. Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk menyusun proposal hingga menyelesaikan tesis adalah selama 3 bulan yang dimulai dari pengambilan data sampai pada tahap kesimpulan.

3. Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Populasi juga diartikan sebagai seluruh kumpulan yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Istiatin & Sudarwati, 2022). Populasi pada penelitian ini adalah data perencanaan anggaran, data anggaran kas, data tingkat serapan anggaran, data penilaian

kinerja dan data tingkat pengembalian anggaran tahun 2021 – 2025 di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

4. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data bulanan pada data perencanaan anggaran, data anggaran kas, data tingkat serapan anggaran, data penilaian kinerja dan data tingkat pengembalian anggaran tahun 2021 – 2025 di Kecamatan Serengan Kota Surakarta sehingga jumlah sampel yang digunakan 60 sampel.

5. Tehnik Sampling

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan total sampling. Sampel yang digunakan yaitu data perencanaan anggaran, data anggaran kas, data tingkat serapan anggaran, data penilaian kinerja dan data tingkat pengembalian anggaran tahun 2021 – 2025 di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian, untuk mencari data yang lengkap terkait dengan masalah yang diteliti. Cara melakukan pengumpulan data adalah mendokumentasikan dokumen laporan tahunan yang masuk dalam sampel pada penelitian ini pada tahun 2021-2025.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut dengan variable terkait merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variable independen (Sugiyono, 2017). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah metode pengukuran kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa efektif organisasi dalam menghasilkan laba serta mengelola sumber daya finansialnya. Kinerja Keuangan di ukur dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

Output aktual diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Output target diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut dengan variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi variable dependen atau variable terkait (Sugiyono, 2017). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, anggaran kas, tingkat penyerapan anggaran, penilaian kinerja dan tingkat pengembalian anggaran.

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1	Perencanaan anggaran (X1)	Perencanaan anggaran terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. (Julianti, 2025)	Perencanaan anggaran (%) = $\frac{\text{(Realisasi Indikator / Target Indikator)}}{\times 100\%}$
2	Anggaran kas (X2)	Anggaran kas merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu entitas. (Viroza <i>et al.</i> , 2025)	Anggaran kas = $\frac{\text{Pagu anggaran} \times \text{Presentase rencana serapan anggaran per tri wulan}}{\times 100\%}$
3	Tingkat penyerapan anggaran (X3)	Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan anggaran. (Suci <i>et al.</i> , 2024)	Tingkat Serapan Anggaran = $\frac{\text{(Realisasi belanja/Total anggaran)}}{\times 100\%}$
4	Penilaian kinerja (X4)	Penilaian kinerja keuangan adalah suatu proses evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. (Riesdi, 2024)	Penilaian kinerja = $\frac{\sum (\text{Capaian IKU} \times \text{Bobot IKU})}{\sum \text{Bobot IKU}}$
5	Tingkat pengembalian anggaran (X5)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Chasanah & Handayani (2025) didefinisikan sebagai selisih positif antara realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu entitas pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. (Chasanah & Handayani, 2025)	SilPA = $\text{Pagu anggaran} - \text{Serapan anggaran}$

C. Rencana Analisa Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018:147) Analisis Statistik Deskriptif adalah statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 160) Uji Normalitas bertujuan menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalisasi ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Nilai *Kolmogorov Smirnov* dapat dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Data residu memiliki distribusi yang normal

H_a : data residu memiliki distribusi yang tidak normal

Apabila nilai signifikan $> 0,05$ berarti H_0 diterima, maka data esudual memiliki distribusi yang normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikan $< 0,05$ berarti H_0 ditolak, maka data residu memiliki distribusi yang tidak normal (Ghozali & Ratmono, 2017).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018:107) uji multikolinearitas adalah pengujian apakah model regresi memiliki korelasi diantara variabel independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas menguji *Tolerance* diatas angka 0,1 sedangkan batas VIF adalah 1.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yang dalam penelitian ini adalah variabel budaya kerja, kompetensi SDM, motivasi dan lingkungan kerja. Menurut Maryam (2015: 59) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- 3) Dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karna $VIF=1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas tinggi. Nilai *cut off* yang secara umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018: 134) tujuan menguji uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan Untuk memastikan bahwa error (residual) antar periode atau observasi bersifat independen. Jika residual saling berkorelasi, maka asumsi klasik regresi linier tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi biasa dan tidak efisien Ghozali (2021:163). Gejala autokorelasi ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji statistik *Durbin Wtson*. Kriteria dalam uji ini sebagai berikut :

- 1) Apabila $d < d_1$ atau $d > (4 - d_1)$, maka terjadi autokoreksi.
- 2) Apabila $d_u < d < (4 - d_u)$, maka tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Apabila $d_1 < d < d_u$ atau $(4 - d_u) < d < (4 - d_1)$, maka pengujian tidak meyakinkan atau ragu-ragu.

3. Regresi Linear Berganda

a. Model Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2019: 277) menyatakan bahwa regresi linear berganda digunakan jika peneliti bermaksud akan meramalkan mengenai bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor preiktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Keuangan
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien besarnya regresi/ pengaruh
X_1 ,	= Perencanaan anggaran
X_2 ,	= Anggaran kas
X_3	= Penyerapan anggaran
X_4	= Penilaian kinerja
X_5	= Tingkat pengembalian anggaran
e	= error

b. Uji Kelayakan Model

Uji F atau uji signifikan simultan digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen (perencanaan anggaran, anggaran kas, penyerapan anggaran, penilaian kinerja, dan tingkat pengembalian anggaran) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan).

Kriteria pengujian:

- 1) $Pvalue < 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan penelitian.
- 2) $Pvalue > 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

b)

c. Uji Hipotesa

Menurut ghozali (2018: 152) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut

1) Menentukan Hipotesa

$H_0 : \beta = 0$ (artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat)

$H_a : \beta \neq 0$ (artinya ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat)

2) Menentukan *level of significance* $\alpha = 0,05$

3) Perhitungan nilai t

$$t = \frac{b - \beta}{Sb}$$

keterangan :

t : Besarnya t_{hitung}

b : Koefisien Regresi

β : Nilai dari hipotesis 0

Sb : Standar error regresi

4) Keputusan

H_0 ditolak, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan H_0 diterima jika diperoleh nilai

$$t_{hitung} < t_{tabel}$$

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021: 147), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variable-variabel independen dalam model dapat menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Sedangkan nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi adalah 0, maka tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2021). Namun, apabila nilai koefisien determinasi adalah 1, maka terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R^2 bernilai negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai 0. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = ESS/TSS = 1 - (RSS/TSS)$$

Dimana :

$ESS = Explain\ sum\ of\ square$

$TSS = Total\ sum\ of\ square$

Nilai RSS tergantung pada banyaknya variabel bebas yang terdapat dalam model. Semakin banyak variabel bebas, maka nilai RSS semakin menurun sehingga R^2 akan meningkat. Maka dering digunakan

nilai R^2 yang telah disesuaikan derajat kebebasannya. Hubungan R^2 dengan R^2 yang disesuaikan dapat ditulis sebagai berikut:

$$R^2_{\text{adj}} = \frac{1 - (1 - R^2)N - 1}{N - K}$$

Dimana,

N = Jumlah observasi

K = Jumlah variabel bebas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Serengan merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta, dengan luas wilayah sekitar 3,19 km² dan terdiri dari tujuh kelurahan, yakni: Serengan, Joyotakan, Danukusuman, Jayengan, Kemlayan, Kratonan, dan Tipes. Sebagai unit pelaksana pemerintahan terdepan, Kecamatan Serengan mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Kecamatan Serengan selama periode Tahun Anggaran (TA) 2021 hingga 2025. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran bulanan yang diperoleh dari sistem informasi keuangan daerah, dengan total 60 observasi yang mencakup 5 tahun anggaran (masing-masing 12 bulan per tahun). Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas meliputi: (1) Perencanaan Anggaran (X1) yang diukur berdasarkan persentase kumulatif penyusunan rencana belanja terhadap total anggaran; (2) Anggaran Kas (X2)

yang diukur dari persentase realisasi anggaran kas sesuai ketentuan; (3) Tingkat Penyerapan Anggaran (X3) yang dihitung dari rasio realisasi belanja terhadap pagu anggaran kumulatif; (4) Penilaian Kinerja (X4) yang diukur melalui skor evaluasi kinerja instansi; dan (5) Tingkat Pengembalian Anggaran/SiLPA (X5) yang diukur dalam satuan rupiah. Variabel terikat adalah Kinerja Keuangan (Y) yang diukur berdasarkan skor komposit kinerja realisasi anggaran kecamatan.

Pengelolaan keuangan daerah di tingkat kecamatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pedoman teknis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kecamatan Serengan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengelola anggaran yang mencakup program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Selama periode 2021–2025, alokasi anggaran mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19, transformasi digital layanan pemerintah, serta kebijakan fiskal Pemerintah Kota Surakarta.

Sebagaimana dikemukakan oleh Indriani *et al.* (2025), pengelolaan keuangan di tingkat SKPD sangat dipengaruhi oleh kapasitas perencanaan, ketersediaan anggaran kas, dan komitmen pengelola keuangan dalam merealisasikan program kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan kajian Widiatmoko (2025) yang menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari efektivitas tata kelola

anggaran pada setiap unit kerja, termasuk kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

B. Hasil Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Ghazali (2021) menyatakan bahwa statistik deskriptif merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan analisis inferensial, karena memberikan pemahaman tentang distribusi dan variabilitas data secara keseluruhan. Berikut disajikan hasil analisis statistik deskriptif untuk 60 observasi data selama periode Tahun Anggaran 2021–2025:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Dev.
Kinerja Keuangan (Y)	60	30,76	100,00	73,86	18,03
Perencanaan Anggaran (X1)	60	7,46	99,42	48,10	25,50
Anggaran Kas (X2)	60	0,00	20.631.626.250	7.358.071.084	5.152.340.207
Penyerapan Anggaran (X3)	60	0,00	100,00	73,38	28,84
Penilaian Kinerja (X4)	60	10,37	85,29	53,75	23,11
Pengembalian Anggaran (X5)	60	0,00	5.581.065.064	1.081.784.745	1.460.943.901

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.1, variabel Kinerja Keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 73,86% dengan nilai minimum sebesar 30,76% dan nilai maksimum sebesar 100,00%, serta standar deviasi sebesar 18,03. Nilai rata-rata kinerja keuangan sebesar 73,86% mengindikasikan bahwa secara umum Kecamatan Serengan mampu merealisasikan hampir tiga per empat dari target kinerjanya selama periode Tahun Anggaran 2021–2025. Nilai minimum sebesar 30,76% menunjukkan terdapat bulan-bulan tertentu di mana pencapaian kinerja keuangan masih sangat rendah, sedangkan nilai maksimum 100,00% mengindikasikan adanya bulan di mana kinerja keuangan mencapai target penuh. Standar deviasi sebesar 18,03 menggambarkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan antara satu periode bulanan dan periode lainnya, yang mencerminkan pola penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun (Ghozali, 2021).

Variabel Perencanaan Anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 48,10% dengan nilai minimum 7,46% dan nilai maksimum 99,42%, serta standar deviasi sebesar 25,50. Nilai rata-rata yang masih berada di bawah 50% mengindikasikan bahwa secara kumulatif bulanan, penyelesaian dokumen perencanaan anggaran baru mencapai sekitar separuh dari total target pada pertengahan tahun anggaran. Hal ini konsisten dengan pola perencanaan anggaran pemerintah yang umumnya difinalisasi menjelang akhir tahun anggaran (Julianti, 2025). Variabel Anggaran Kas memiliki nilai rata-rata sebesar Rp7.358.071.084,00 dengan nilai minimum Rp0,00 dan

nilai maksimum Rp20.631.626.250,00, serta standar deviasi sebesar Rp5.152.340.207,00. Nilai rata-rata anggaran kas yang cukup besar mencerminkan skala pengelolaan keuangan Kecamatan Serengan, sedangkan nilai minimum nol mengindikasikan adanya bulan tertentu di mana alokasi anggaran kas belum tersedia, terutama pada awal tahun anggaran (Viroza *et al.*, 2025).

Variabel Penyerapan Anggaran menunjukkan nilai rata-rata yaitu sebesar 73,38% dengan nilai minimum 0,00% dan nilai maksimum 100,00%, serta standar deviasi sebesar 28,84. Nilai rata-rata tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 73,38% menunjukkan bahwa realisasi belanja Kecamatan Serengan secara rata-rata telah menyerap lebih dari tiga per empat pagu anggaran yang tersedia. Standar deviasi sebesar 28,84 yang cukup besar mengindikasikan adanya variasi penyerapan yang signifikan antara bulan-bulan awal tahun anggaran dan bulan-bulan menjelang akhir tahun anggaran, yang sejalan dengan pola penyerapan anggaran pemerintah yang cenderung terkonsentrasi pada kuartal terakhir (Suci *et al.*, 2024). Variabel Penilaian Kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 53,75 dengan nilai minimum 10,37 dan nilai maksimum 85,29, serta standar deviasi sebesar 23,11. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa capaian penilaian kinerja instansi berada pada tingkat sedang, dengan variasi yang cukup besar antara bulan-bulan dengan capaian rendah dan bulan-bulan dengan capaian tinggi. Variabel Pengembalian Anggaran/SiLPA memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1.081.784.745,00 dengan nilai minimum Rp0,00

dan nilai maksimum Rp5.581.065.064,00, serta standar deviasi sebesar Rp1.460.943.901,00. Besarnya SiLPA pada beberapa periode mengindikasikan masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir periode anggaran, yang dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan secara keseluruhan (Chasanah & Handayani, 2025).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, agar estimasi koefisien yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Menurut Gujarati dan Porter (2009), asumsi klasik mencakup normalitas residual, tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi. Pengujian asumsi klasik dilakukan secara komprehensif untuk memastikan validitas model regresi yang dibangun.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini penting karena inferensi statistik dalam regresi linear berganda mengasumsikan bahwa residual berdistribusi normal (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dikarenakan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 observasi sehingga memenuhi kriteria ukuran sampel yang disyaratkan oleh uji ini. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena efektif

diterapkan pada sampel berukuran sedang hingga besar dan menghasilkan nilai signifikansi yang lebih presisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2021), uji ini merupakan uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan lebih dapat diandalkan pada ukuran sampel $n \geq 30$.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Uji Normalitas	Statistik	Sig.
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,079	0,200
Keterangan	Normal	p > 0,05

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai statistik sebesar 0,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200.

Oleh karena nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($p > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti residual model regresi memiliki distribusi yang normal. Hasil ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas dalam analisis regresi linear berganda telah terpenuhi, sehingga inferensi statistik lebih lanjut dapat dilakukan secara valid (Ghozali, 2021).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan linear yang kuat (korelasi tinggi) antarvariabel

independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang parah dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak stabil, standar error membesar, dan uji t menjadi tidak dapat dipercaya (Gujarati & Porter, 2009). Deteksi multikolinearitas dilakukan melalui perhitungan *Variance Inflation Factor (VIF)*, di mana nilai VIF lebih besar dari 10 mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas yang serius (Hair *et al.*, 2019).

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

Variabel	VIF	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	1,054	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Anggaran Kas (X2)	1,530	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Penyerapan Anggaran (X3)	1,416	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Penilaian Kinerja (X4)	1,054	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengembalian Anggaran (X5)	1,077	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Lampiran 3

Hasil uji VIF pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran memiliki nilai VIF sebesar 1,054 yang berada jauh di bawah nilai ambang batas 10, menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel tersebut.

Sementara itu, variabel Anggaran Kas memiliki nilai VIF sebesar 1,530; Penyerapan Anggaran sebesar 1,416; Penilaian Kinerja sebesar 1,054; dan Pengembalian Anggaran sebesar 1,077.

Seluruh nilai VIF dari kelima variabel independen berada di bawah nilai kritis 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang dibangun. Hasil ini mengonfirmasi bahwa setiap variabel independen memberikan informasi yang unik dan tidak redundan dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sehingga estimasi koefisien regresi dapat diandalkan (Hair *et al.*, 2019).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah variasi residual bersifat konstan (homoskedastis) atau berubah-ubah (heteroskedastis) di seluruh rentang nilai variabel prediktor. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya heteroskedastisitas, karena apabila variabel prediktor memiliki perbedaan varians residual, maka estimator OLS menjadi tidak efisien meskipun tetap tidak bias (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Breusch-Pagan, yang merupakan salah satu uji formal yang paling banyak digunakan dalam analisis regresi (Breusch & Pagan, 1979).

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Uji Glejser*)

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
Perencanaan Anggaran	,049	,704	Tidak Terjadi Heteroskedastis
Anggaran Kas	,137	,376	Tidak Terjadi Heteroskedastis
Penyerapan Anggaran	,164	,272	Tidak Terjadi Heteroskedastis
Penilaian Kinerja	-,254	,051	Tidak Terjadi Heteroskedastis
Pengembalian Anggaran	-,186	,155	Tidak Terjadi Heteroskedastis

Sumber: Lampiran 3

Hasil Uji *Glejser* pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi Perencanaan Anggaran sebesar 0,704; Anggaran Kas sebesar 0,376; Penyerapan Anggaran sebesar 0,272; Penilaian Kinerja sebesar 0,051; dan Pengembalian Anggaran sebesar 0,155.

Semua nilai signifikansi tersebut berada di atas taraf signifikansi 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual absolut dengan variabel-variabel independen.

Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga estimasi koefisien OLS tetap bersifat efisien dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Ghozali, 2021).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya ditemukan pada data yang bersifat time series atau panel, di mana observasi berurutan dalam waktu cenderung saling berpengaruh (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson (DW). Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai DW terhadap nilai kritis batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin-Watson dengan $k=5$ variabel dan $n=60$ observasi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin-Watson*)

Uji Durbin-Watson	Nilai DW	Keterangan
Durbin-Watson Statistic	2,179	Tidak Terjadi Autokorelasi
dL ($k=5$, $n=60$)	1,4080	Batas bawah
dU ($k=5$, $n=60$)	1,7671	Batas atas

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah 2,179.

Dengan nilai dL sebesar 1,4080 dan dU sebesar 1,7671 pada $k=5$ dan $n=60$, dapat diverifikasi bahwa nilai DW sebesar 2,179 berada pada rentang $dU < DW < (4-dU)$, yaitu $1,7671 < 2,179 < 2,2329$.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif pada model regresi yang dibangun. Pemenuhan asumsi ini memastikan bahwa estimasi koefisien regresi bersifat efisien dan tidak bias, sehingga hasil uji hipotesis dapat diinterpretasikan dengan tepat (Gujarati & Porter, 2009).

3. Uji Regresi Linear Berganda

Tujuan pengujian analisis regresi berganda adalah untuk mendapatkan koefisien regresi dalam menentukan hipotesis diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian model regresi adalah sebagai berikut :

a. Model Regresi

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta (C)	56,077	8,789	6,381	,000	—
Perencanaan Anggaran (X1)	,275	,086	3,188	,002	Signifikan
Anggaran Kas (X2)	-1,432E-9	,000	-2,779	,007	Signifikan
Penyerapan Anggaran (X3)	,201	,089	2,273	,027	Signifikan
Penilaian Kinerja (X4)	,004	,095	,046	,964	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pengembalian Anggaran (X5)	1,857E-10	,000	,198	,843	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.6, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = 56,077 - 0,275 X_1 - 0,0000000014 X_2 + 0,201 X_3 + 0,004 X_4 + 0,0000000002 X_5$$

Persamaan model regresi tersebut dapat dijelaskan masing – masing sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (nilai mutlak) sebesar 56,077 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka kinerja keuangan Kecamatan Serengan diperkirakan sebesar 56,077%. Nilai konstanta positif ini mencerminkan adanya faktor-faktor dasar yang mendukung kinerja keuangan instansi di luar pengaruh kelima variabel independen yang diuji dalam penelitian ini.
- 2) Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 0,275 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan persentase Perencanaan Anggaran akan meningkatkan Kinerja Keuangan sebesar 0,275%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas dan kelengkapan dokumen perencanaan anggaran yang disusun, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan yang dicapai oleh Kecamatan Serengan.
- 3) Nilai Anggaran Kas sebesar $-1,432 \times 10^{-9}$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu rupiah Anggaran Kas akan menurunkan Kinerja Keuangan sebesar $1,432 \times 10^{-9}\%$, dengan asumsi variabel lain konstan. Tanda negatif mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran kas yang tidak diimbangi dengan realisasi yang memadai

justru dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan, mengingat besarnya anggaran kas yang tidak terserap pada akhir periode menunjukkan ketidakefisienan pengelolaan keuangan.

- 4) Nilai Penyerapan Anggaran sebesar 0,201 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan persentase Penyerapan Anggaran akan meningkatkan Kinerja Keuangan sebesar 0,201%, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran yang dicapai, semakin baik kinerja keuangan yang dihasilkan oleh instansi, karena realisasi belanja yang optimal mencerminkan kemampuan instansi dalam melaksanakan program kegiatan sesuai rencana.
- 5) Nilai Penilaian Kinerja sebesar 0,004 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan skor Penilaian Kinerja akan meningkatkan Kinerja Keuangan sebesar 0,004%, dengan asumsi variabel lain konstan. Meskipun pengaruhnya positif, nilai koefisien yang sangat kecil disertai nilai signifikansi sebesar 0,964 mengindikasikan bahwa pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Keuangan tidak bermakna secara statistik dalam model penelitian ini.
- 6) Nilai Pengembalian Anggaran/SiLPA sebesar $1,857 \times 10^{-10}$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu rupiah Pengembalian Anggaran/SiLPA akan meningkatkan Kinerja Keuangan sebesar $1,857 \times 10^{-10}\%$, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien yang sangat kecil dan tidak signifikan (sig. 0,843) mengindikasikan

bahwa SiLPA tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kinerja keuangan secara langsung dalam konteks penelitian ini.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (uji F) menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kelayakan model menggunakan tingkat signifikan $< 0,05$. Hasil penelitian uji kelayakan model (uji F) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	4503,338	5	900,668	3,313	,011 ^b
	Residual	14679,763	54	271,847		
	Total	19183,101	59			

Sumber: Lampiran 3

Uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) dilakukan melalui uji F untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun secara simultan mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara signifikan.

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai F hitung diperoleh sebesar 3,313 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.

Hasil tersebut membuktikan bahwa model regresi yang dibangun layak digunakan (*goodness of fit*), dan kelima variabel independen (perencanaan anggaran, anggaran kas, penyerapan anggaran, penilaian

kinerja, dan pengembalian anggaran) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Model regresi yang terbentuk dinilai valid dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut (Ghozali, 2021).

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 4.8
Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
H1	Perencanaan Anggaran (X1)	3,188	2,005	,002	Berpengaruh Signifikan	H _{1a} tidak ditolak
H2	Anggaran Kas (X2)	-2,779	2,005	,007	Berpengaruh Signifikan	H _{2a} tidak ditolak
H3	Penyerapan Anggaran (X3)	2,273	2,005	,027	Berpengaruh Signifikan	H _{3a} tidak ditolak
H4	Penilaian Kinerja (X4)	,046	2,005	,964	Tidak Signifikan	H _{4o} ditolak
H5	Pengembalian Anggaran (X5)	,198	2,005	,843	Tidak Signifikan	H _{5o} ditolak

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil Berdasarkan tabel 4.8 diatas dari hasil uji hipotesis (uji t) yaitu sebagai berikut :

1) Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

H_{1a} : Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil pengujian bahwa perencanaan anggaran mempunyai t hitung sebesar 3,188 lebih besar dari t tabel

sebesar 2,005 dengan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable perencanaan anggaran diterima, yang berarti perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

2) Pengaruh Anggaran Kas terhadap Kinerja Keuangan

H_{2a} : Anggaran kas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa anggaran kas mempunyai t hitung sebesar -2,779 yang secara absolut lebih besar dari t tabel sebesar 2,005, dengan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian variabel anggaran kas diterima, yang berarti anggaran kas berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

3) Pengaruh Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

H_{3a} : Penyerapan anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil pengujian bahwa penyerapan anggaran mempunyai t hitung sebesar 2,273 lebih besar dari t tabel sebesar 2,005, dengan nilai signifikansi 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable penyerapan anggaran diterima, yang berarti penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

4) Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Keuangan

H_{4o} : Penilaian kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil pengujian bahwa penilaian kinerja

mempunyai t hitung sebesar 0,046 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,005, dengan nilai signifikansi 0,964 yang jauh lebih besar dari 0,05. . Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable penilaian kinerja ditolak, yang berarti penilaian kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

5) Pengaruh Pengembalian Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

H_{50} Pengembalian anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil pengujian bahwa pengembalian anggaran mempunyai t hitung sebesar 0,198 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,005, dengan nilai signifikansi 0,843 yang jauh lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable pengembalian anggaran ditolak, yang berarti pengembalian anggaran/SiLPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

d. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen memberikan presentase terhadap variabel dependen. Hasil penelitian uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

Indikator Model	Nilai	Keterangan
<i>R-Squared (R^2)</i>	0,485	Variabel independen secara bersama-sama menjelaskan 48,5% variasi kinerja keuangan
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,235	Setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi, sebesar 23,5% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan
<i>Standard Error of Estimate</i>	16,48780	Rata-rata simpangan prediksi model dari nilai aktual kinerja keuangan sebesar 16,488 poin persentase
Jumlah Observasi (n)	60	Total data observasi bulanan Kecamatan Serengan periode Tahun Anggaran 2021–2025

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perencanaan anggaran, anggaran kas, penyerapan anggaran, penilaian kinerja, dan pengembalian anggaran memberikan persentase pengaruh sebesar 23,5% terhadap variabel kinerja keuangan, sedangkan sisanya sebesar 76,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji setiap variable perencanaan anggaran, anggaran kas, penyerapan anggaran, penilaian kinerja dan pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengujian empiris terhadap beberapa variable yang diajukan dalam penelitian ini. Tidak semua variable independen mempunyai variable dependen.

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan arah yang negatif. Temuan ini memberikan gambaran menarik tentang dinamika siklus anggaran tahunan di Kecamatan Serengan. Pada awal tahun anggaran, ketika persentase realisasi perencanaan masih relatif rendah, kinerja keuangan justru cenderung lebih baik karena pengelola keuangan memiliki ruang gerak yang lebih luwes dalam mengalokasikan sumber daya. Sebaliknya, pada akhir tahun saat persentase perencanaan mendekati seratus persen, tekanan administratif yang menumpuk seperti penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, percepatan pencairan anggaran, dan evaluasi capaian kinerja secara bersamaan justru berpotensi menghambat kelancaran realisasi anggaran.

Temuan ini sejalan dengan argumen Suwono (2024) bahwa perencanaan anggaran yang bersifat kaku dan kurang adaptif terhadap kondisi lapangan justru dapat menurunkan efektivitas realisasi. Fenomena ini juga relevan dengan kondisi empiris pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, di mana

perencanaan yang ditetapkan di awal tahun sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual yang berkembang sepanjang tahun. Oleh karena itu, penting bagi Kecamatan Serengan untuk membangun sistem perencanaan yang lebih responsif dan mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan tanpa harus mengorbankan kualitas pelaksanaan anggaran di penghujung tahun.

2. Pengaruh Anggaran Kas terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa anggaran kas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menegaskan betapa krusialnya ketersediaan dan ketepatan waktu pencairan anggaran kas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan. Ketika anggaran kas tersedia sesuai jadwal yang telah direncanakan, unit kerja dapat melaksanakan kegiatan secara tepat waktu tanpa harus menunggu ketersediaan dana, yang pada akhirnya mendorong peningkatan realisasi belanja dan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Indriani *et al.*, (2025) dan Viroza *et al.*, (2025) yang menekankan bahwa pengelolaan anggaran kas yang efektif merupakan fondasi utama bagi stabilitas keuangan instansi pemerintah. Ketidaktepatan dalam penyusunan dan realisasi anggaran kas dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana yang berimbas pada tertundanya pelaksanaan kegiatan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya Kecamatan Serengan memperkuat mekanisme perencanaan arus kas bulanan yang lebih akurat dan realistis, serta meningkatkan koordinasi antara pengelola

keuangan dan pelaksana kegiatan agar pencairan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.

3. Pengaruh Tingkat Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengkonfirmasi logika dasar penganggaran berbasis kinerja, bahwa semakin tinggi realisasi penyerapan anggaran mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana, sumber daya digunakan secara produktif, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Rahayuningsih dan Syaflan (2023) yang menempatkan realisasi penyerapan anggaran sebagai indikator utama efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penyerapan anggaran yang tinggi bukan semata-mata tujuan akhir, melainkan harus disertai dengan kualitas belanja yang baik dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Permasalahan umum yang sering muncul di kecamatan adalah ketidakmerataan penyerapan sepanjang tahun, di mana belanja cenderung menumpuk di akhir tahun. Kondisi ini harus diatasi dengan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran melalui perbaikan proses pengadaan dan penyiapan dokumen yang lebih sistematis.

4. Pengaruh Penilaian Kinerja Instansi terhadap Kinerja Keuangan

Berbeda dari tiga variabel sebelumnya, hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa penilaian kinerja instansi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini memberikan refleksi penting tentang sejauh mana sistem evaluasi kinerja yang berlaku di Kecamatan Serengan benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan pengelolaan keuangan. Salah satu penjelasan yang dapat dikemukakan adalah adanya jeda waktu (time lag) antara pelaksanaan penilaian kinerja dan dampaknya terhadap realisasi keuangan pada periode yang sama. Penilaian kinerja melalui instrumen seperti SAKIP cenderung bersifat evaluatif atas periode yang telah lewat, sehingga hasilnya belum secara langsung mendorong perubahan perilaku pengelolaan anggaran dalam jangka pendek.

Selain itu, sistem penilaian kinerja yang masih lebih bersifat administratif dan formalitas dibandingkan substantif juga dapat menjelaskan lemahnya hubungan tersebut. Apabila hasil penilaian kinerja tidak secara langsung diintegrasikan ke dalam proses penyusunan anggaran periode berikutnya, maka pengaruhnya terhadap realisasi keuangan pada periode berjalan akan menjadi sangat terbatas. Temuan ini berbeda dari Nansi *et al.*, (2025) yang menemukan korelasi positif signifikan, perbedaan yang dapat dikaitkan dengan perbedaan konteks kelembagaan, skala pemerintahan, dan tingkat implementasi sistem penilaian kinerja yang lebih matang. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya Kecamatan Serengan mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja secara lebih substantif ke dalam siklus perencanaan dan

penganggaran agar penilaian kinerja benar-benar menjadi instrumen perbaikan tata kelola keuangan.

5. Pengaruh Tingkat Pengembalian Anggaran/SiLPA terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian anggaran atau SiLPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Tidak pengaruh pengembalian anggaran/SiLPA terhadap kinerja keuangan dapat dipahami dari perspektif bahwa SiLPA merupakan hasil akhir dari proses pengelolaan anggaran, bukan faktor penentu kinerja keuangan itu sendiri. Chasanah dan Handayani (2025) menjelaskan bahwa SiLPA yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang buruk, karena dapat disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, perubahan kebijakan anggaran, atau efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Fitriani dan Syarif (2025) dalam kajiannya terhadap pemerintah daerah di Jawa Barat juga menemukan bahwa hubungan antara SiLPA dan kinerja keuangan tidak selalu bersifat linear, bergantung pada konteks dan kondisi fiskal daerah. Nurullah *et al.*, (2025) berpendapat bahwa pengurangan SiLPA memerlukan perbaikan sistem perencanaan dan eksekusi anggaran secara menyeluruh, bukan hanya melalui pengelolaan sisa anggaran semata. Dalam konteks Kecamatan Serengan, nilai SiLPA yang bervariasi antar bulan lebih mencerminkan ritme pencairan dan pelaksanaan kegiatan daripada menjadi determinan kinerja keuangan yang independen.

Secara keseluruhan, model penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari lima variabel pengelolaan anggaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Implikasi manajerial yang dapat ditarik adalah perlunya penguatan manajemen anggaran kas, percepatan dan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun, serta pemanfaatan hasil penilaian kinerja secara lebih operasional sebagai dasar perbaikan pengelolaan keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan, yang selama ini masih relatif terbatas dikaji secara empiris.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Serengan Kota Surakarta, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan pada Kecamatan Serengan. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), maupun pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik, kapasitas anggaran, dan sistem pengelolaan keuangan yang berbeda.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan kinerja bulanan selama periode Tahun Anggaran 2021–2025 dengan jumlah observasi sebanyak 60 data. Meskipun

telah memenuhi kebutuhan analisis statistik, jumlah observasi yang relatif terbatas dapat memengaruhi kemampuan model dalam menangkap variasi hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif.

3. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, yaitu perencanaan anggaran, anggaran kas, tingkat penyerapan anggaran, penilaian kinerja, dan tingkat pengembalian anggaran (SiLPA). Sementara itu, kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model penelitian, seperti kualitas sumber daya manusia, kompetensi pengelola keuangan, sistem pengendalian intern, kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai analisis kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan tahun anggaran 2021–2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
2. Anggaran kas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
3. Tingkat penyerapan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
4. Penilaian kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
5. Tingkat pengembalian anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi baik secara teoritis maupun praktis yang perlu diperhatikan:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, anggaran kas, penyerapan anggaran, penilaian kinerja dan pengembalian anggaran terhadap kinerja keuangan pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

2. Implikasi Praktis

Bagi Kecamatan Serengan Kota Surakarta, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi manajemen anggaran kas sebagai komponen yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan kas yang tepat waktu dan sesuai ketentuan perlu terus ditingkatkan agar pembiayaan kegiatan tidak terhambat di lapangan. Percepatan penyerapan anggaran secara merata sepanjang tahun anggaran, dan tidak menumpuk di akhir tahun, juga perlu menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kota Surakarta, temuan tentang ketidaksignifikanan penilaian kinerja memberikan sinyal perlunya penguatan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih operasional dan berorientasi pada hasil. Evaluasi kinerja seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diintegrasikan secara langsung ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran anggaran berikutnya sehingga hasil evaluasi dapat mendorong perbaikan kinerja keuangan yang nyata.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Perencanaan anggaran. Kecamatan Serengan Kota Surakarta perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan, tidak hanya kaku mengikuti dokumen DPA di awal tahun. Petunjuk teknis pelaksanaan setiap program sebaiknya sudah disiapkan sebelum tahun anggaran berjalan, dan dilakukan evaluasi serta penyesuaian rencana secara berkala (per triwulan), agar beban administratif tidak menumpuk di akhir tahun dan tidak menghambat realisasi anggaran.
2. Anggaran kas. Mengingat anggaran kas terbukti berpengaruh signifikan dan positif serta memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja keuangan, Kecamatan Serengan perlu memperkuat perencanaan arus kas bulanan agar lebih akurat dan realistis, meningkatkan koordinasi antara bendahara/pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan, dan memastikan pencairan dana dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tertunda.
3. Tingkat penyerapan anggaran. Kecamatan Serengan perlu mendorong percepatan dan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, menetapkan target penyerapan per triwulan, serta melakukan monitoring

realisasi secara rutin agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

4. Penilaian kinerja. Karena penilaian kinerja belum terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Kecamatan Serengan bersama Pemerintah Kota Surakarta perlu mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja (SAKIP) secara lebih substantif ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran periode berikutnya, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Umpan balik hasil evaluasi juga perlu dipercepat agar tidak terjadi jeda waktu (time lag) yang membuat hasil penilaian kurang berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan.
5. Tingkat pengembalian anggaran (SiLPA). Meskipun SiLPA tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Kecamatan Serengan tetap perlu menekan nilai SiLPA melalui perbaikan sistem perencanaan dan eksekusi anggaran secara menyeluruh, bukan hanya melalui pengelolaan sisa anggaran di akhir periode. Penyebab struktural seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau perubahan kebijakan anggaran juga perlu diidentifikasi dan diantisipasi lebih awal agar tidak menimbulkan sisa anggaran yang tidak terserap.
6. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan monitoring realisasi anggaran bulanan di seluruh kecamatan khususnya dalam aspek perencanaan anggaran, anggaran kas, dan penyerapan anggaran. Monitoring secara berkala dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi atau dashboard keuangan yang mampu

menyajikan perkembangan realisasi anggaran secara periodik sehingga potensi keterlambatan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

7. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan tingkat kepatuhan administrasi, serta menggunakan data dari beberapa kecamatan atau daerah agar generalisasi hasil penelitian dapat lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Suci Patiwi Hasan, B. S. N. (2024). Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan PT PLN (Persero) Kabupaten Pinrang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024* Page 2811-2825, 4, 2811–2825. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di bpkad pemerintah kota tanjungpinang 1,2,3. 10(1), 174–185.
- Cahyaningrum, M., & Sitoresmi, M. W. (2025). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Di Kantor Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2024. *Muara*, 1–10.
- Chasanah & Handayani. (2025). Pengaruh PAD, DAU DAN SILPA Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderating Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Dara Nadeya Dinanty, Nur Ainiyah, Hartono Hartono, & Nurdiana Fitri Isnaini. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 173–183. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.874>
- Desember, N., Pulungan, Z., Azqy, S., Saputri, N., & Sari, R. (2024). Pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : “ Studi Kasus Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Sektor Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Modern*, 6(4), 73–86.
- Erica, D., Ratiyah, R., & Shah, S. M. A. R. (2025). Analysis of Public Sector Financial Performance With The Value For Money Approach In Bogor Regency. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 4(1), 17–29. <https://doi.org/10.12928/jampe.v4i1.11566>
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *ECo-Fin*, 7(1), 334–348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi ke-1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hutagalung, M. A., Nurbaiti, N., Lubis, A. W., Nurlaila, N., & Inayah, N. (2024). The Influence Of Budget Planning And Budget Implementation On The Level Of Budget Absorption. *International Journal Of Economics Social And Technology*, 3(4), 99–110. <https://doi.org/10.59086/ijest.v3i4.362>
- Indriani, J. D., Putri, A., Kemala, S., Hurnis, D., & Handana, B. (2025). Pengaruh Anggaran Kas, Pelaksanaan Penatausahaan Belanja, Dan Kepatuhan Pengelola Keuangan Skpd Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Di Pemerintah Kota Padang Panjang. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1), 73–80. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i1.1977>
- Isaac, L., Lawal, M., & Okoli, T. (2015). A Systematic Review of Budgeting and Budgetary Control in Government Owned Organizations. *Research Journal of Finance and Accounting Wwww.Iiste.Org ISSN*, 6(6), 1-10. www.iiste.org
- Istiatin, & Sudarwati. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik (FE Uniba).
- Julianti, N., Parepare, U. M., Harapan, B., Parepare, K., Selatan, S., Maiwa, S. K., Daerah, P., & Kinerja, E. (2025). *Implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di kantor kecamatan maiwa kabupaten enrekang*. 5, 95–104.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Nansi, M. R., Hidayati, F., Susanti, M. E. N. T., & Dewitasari, R. P. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023. *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 64–75. <https://doi.org/10.30598/manis.8.2.64-75>
- Nurullah, R., Lail, A., & Trigopala, K. Y. (2025). *Upaya Perbaikan Sistem Politik Sebagai Strategi Pengurangan Silpa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. 2(5), 147–152. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739380>
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Rahayuningsih, D. A., & Syaflan, M. (2023). Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Analisa Pengukuran Kinerja Keuangan Instansi Berdasarkan Capaian Realisasi Anggaran. *Jurnal Akunida*, 10(2), 104–113. <https://doi.org/10.30997/jakd.v10i2.14102>
- Rahmawati, R., Ibrahim, I., Irma, I., Bunyamin, B., & Dahlan, A. (2024). Budget Planning and Internal Control on Local Financial Accountability: Mediating Budget Absorption. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 72–86.

<https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.755>

- Remanta, O., Ramadhan, P. R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN) Volume 05 Nomor 04 Tahun 2024*. 05, 457–465.
- Riesdi, A. M. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 14–33.
- Situmorang, B., Tjaraka, H., & Novita, S. (2025). The impact of public policy on budget realization during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2467442>
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., & Purnomo, A. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwono, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kabupaten Cilacap. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 222–231.
- Tri Handayani, S., Ainun Fadilla, L., Farizi, S., Studi Akuntansi Syariah, P., Achmad Siddiq Jember, U. K., Mataram No, J., Miuo, K., & Kaliwates, K. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2024. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 646–652.
- Viroza, D., Yasmin, P., & Rizal, M. (2025). Optimalisasi Anggaran Kas dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 434–442.
- Widiatmoko, S. M. J. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintahdaerah(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotase-Jawatengah Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 2142.
- Widyawati, N., Manjemen, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2025). *Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Dalam Organisasi*. 02(03), 665–669. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jipmhttp://doi.org/10.47233/jipm.v2i1>

Lampiran 1

Tabel Matrik Penilaian Terdahulu

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
	Pengaruh Profitabilitas Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kabupaten Cilacap (Suwono, 2024)	Jenis penelitian metode deskriptif kuantitatif; Data menggunakan sumber data primer dan sekunder	Perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja
	Implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (Julianti, 2025)	Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif; Sumber data menggunakan data sekunder; Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi.	Implementasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Keuangan.
	Budget Planning and Internal Control on Local Financial Accountability: Mediating Budget Absorption (Rahmawati et al., 2024)	Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data menggunakan sumber data primer dan sekunder Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling;	Optimalisasi perencanaan anggaran berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
	Pengaruh Anggaran Kas, Pelaksanaan Penatausahaan Belanja, dan Kepatuhan Pengelola Keuangan SKPD Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Di Pemerintah Kota Padang Panjang. (Indriani et al., 2025)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif; Sumber data dari kombinasi data primer dan sekunder; Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling; Metode pengolahan data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif.	Anggaran kas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja
5.	Pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja Keuangan perusahaan: “studi kasus pt indofood cbp Sukses makmur sektor manufaktur” (Desember et al., 2024)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif; Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan; Teknik analisis data dianalisis menggunakan pendekatan statistic deskriptif dan regresi linier sederhana.	Penyusunan anggaran yang baik tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja finansial perusahaan secara keseluruhan.
6.	A Systematic Review of Budgeting and Budgetary Control in Government Owned Organizations (Isaac et al., 2023)	Jenis penelitian metode deskriptif kuantitatif; Data menggunakan sumber data primer dan sekunder	Anggaran kas yang efektif sangat diperlukan dalam organisasi milik pemerintah untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
7.	Optimalisasi Anggaran Kas dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan (Viroza <i>et al.</i> , 2025)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif; Sumber data menggunakan data primer dan sekunder; Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Optimalisasi anggaran kas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan di berbagai sektor.
8.	Pengukuran kinerja sektor publik : analisa pengukuran Kinerja keuangan instansi berdasarkan capaian realisasi Anggaran. (Rahayuningsih & Syaflan, 2023)	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif; Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan sekunder berupa dokumen realisasi anggaran;	Penyerapan anggaran memiliki pengaruh cukup efisien dan sangat efektif terhadap kinerja keuangan.
9.	The Influence of Budget Planning And Budget Implementation On The Level of Budget Absorption (Hutagalung <i>et al.</i> , 2024)	Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif; Sumber data menggunakan data primer dan sekunder; Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang didukung perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal.

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
10.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2024 (Tri <i>et al.</i> , 2025)	Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif; Sumber data menggunakan data sekunder; Teknik analisis data yang digunakan terpaku pada konsep organisasi sektor public.	Hasil kinerja keuangan dinilai cukup baik tidak ada pemborosan terhadap anggaran yang telah direncanakan dan telah ditetapkan.
	Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan PT PLN (Persero) Kabupaten Pinran. (Suci <i>et al.</i> , 2024)	Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif; Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder; Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh; Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi analisis kuisioner; Teknis analisis data yang digunakan analisis regresi berganda.	Penyerapan anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
12.	Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Di Kantor Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2024 (Cahyaningrum & Sitoresmi, 2025)	Jenis penelitian metode kualitatif; Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder; Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen; Teknik analisis data dari Metode dokumentasi dan Pendekatan kualitatif;	Pengelolaan anggaran secara keseluruhan berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata persentase

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
13.	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021 (Nadeya <i>et al</i>, 2023)	Jenis penelitian metode deskriptif kuantitatif; Data menggunakan sumber data sekunder; Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi; Pendekatan analisis data dilakukan dengan Value For Money dan Rasio Keuangan.	Realiasi anggagan cukup efisien dan sangat efektif dalam mempengaruhi kinerja keuangan
14.	Analisis pendapatan asli daerah (pad) untuk Menilai kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten bandung barat tahun 2018-2022 (Riesdi, 2024)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif; Data yang digunakan melibatkan data sekunder dan data primer;	Penilaian kinerja cukup efektif terhadap kinerja keuangan
15.	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023 (Nansi <i>et al.</i>, 2025)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif; Sumber data menggunakan data sekunder;	Hasilnya penilaian kinerja keuangan menunjukkan kemajuan yang positif dan signifikan
16.	Analysis of Public Sector Financial Performance With The Value For Money Approach In Bogor Regency (Erica <i>et al.</i>, 2025)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif; Sumber data menggunakan data sekunder;	Penilaian kinerja secara efektif menunjukkan kinerja keuangan yang baik jika penyerapan anggaran tinggi

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
17.	Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-jawa Tengah periode 2019-2023) (Widiatmoko, 2025)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif; Sumber data menggunakan data primer dan sekunder;	Penilaian kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan
18.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023 (Fitriani & Syarif, 2025)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif; Sumber data menggunakan data sekunder;	Tingkat pengembalian anggaran menunjukkan hasil positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
19.	Pengaruh PAD, DAU dan SiLPA terhadap belanja modal dengan Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating (Chasanah & Handayani, 2025)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif; Sumber data menggunakan data sekunder;	Tingkat pengembalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
20.	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif; Sumber data menggunakan data sekunder; Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling	Tingkat pengembalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

No	Judul Jurnal, Nama Peneliti, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil temuan
	(Putri & Ratnawati, 2023)		
21.	Upaya Perbaikan Sistem Politik Sebagai Strategi Pengurangan Silpa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Nurullah et al., 2025)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; Sumber data menggunakan data primer dan sekunder; Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen	Tingkat pengembalian anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
22.	The impact of public policy on budget realization during the COVID-19 pandemic in Indonesia (Situmorang et al., 2025)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif; Sumber data menggunakan data primer dan sekunder;	Tingginya sisa serapan anggaran selama pandemi berkontribusi langsung terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah.

Lampiran 2

Data Variabel

No.	Y	X1	X2	X3	X4	X5
1	79,09	46,42	480.166.666	0,00	36,55	550.112.090
2	57,65	7,46	1.203.808.332	49,89	48,52	759.190.202
3	100,00	57,22	1.451.479.798	82,18	69,87	2.140.228.620
4	82,88	46,36	2.685.263.319	49,03	78,63	3.941.464.389
5	58,84	44,93	3.536.148.000	96,44	43,16	2.217.177.068
6	100,00	36,38	3.871.192.000	91,45	77,89	2.466.297.149
7	98,02	24,44	4.159.687.200	100,00	45,57	1.544.292.101
8	75,53	63,83	5.289.762.200	100,00	67,26	896.906.272
9	100,00	33,47	6.399.090.000	100,00	10,68	1.031.542.379
10	88,24	30,35	8.684.572.880	95,56	12,02	1.182.991.438
11	76,65	64,01	9.946.895.996	93,01	85,24	687.577.272
12	92,67	55,27	10.334.146.855	99,63	18,17	38.040.095
13	52,36	17,79	500.500.000	0,00	62,96	32.874.635
14	60,56	53,79	1.050.950.000	0,00	32,66	237.793.193
15	85,76	22,52	1.591.400.000	26,85	26,07	0
16	85,64	79,61	2.222.500.000	58,35	41,07	0
17	89,34	86,13	2.753.600.000	81,55	84,07	0
18	73,32	51,95	3.287.550.000	50,10	55,62	0
19	84,22	85,42	4.329.250.000	47,69	83,34	0
20	65,48	12,57	5.287.250.000	48,33	66,18	0
21	89,62	53	6.498.000.000	51,77	50,10	0
22	30,76	11,2	8.599.129.000	63,31	50,49	0
23	94,81	45,67	10.264.043.000	70,71	27,51	0
24	33,30	14,17	12.434.569.968	97,67	10,37	289.878.184
25	60,81	17,08	0	0,00	43,43	0

26	92,33	61,69	3.575.000.000	29,27	55,07	0
27	94,19	26,47	1.149.741.000	100,00	80,12	373.789.178
28	77,54	15,16	1.695.441.000	100,00	64,21	0
29	78,99	25,93	5.715.900.000	78,11	77,39	0
30	67,75	38,23	7.248.800.000	84,52	84,09	0
31	46,82	49,44	7.398.800.000	73,29	85,29	0
32	48,08	24,17	7.548.000.000	80,03	75,28	0
33	53,05	65,84	10.827.490.000	94,02	20,51	0
34	67,41	50,89	11.595.451.850	98,21	37,73	0
35	61,16	53	13.177.350.407	95,36	26,68	0
36	79,59	41,75	14.095.323.921	97,91	79,39	294.062.912
37	69,45	80,4	935.443.475	78,31	73,39	123.616.604
38	84,67	60,1	2.179.687.437	48,38	37,92	1.558.394.720
39	81,80	20,42	2.356.985.000	93,70	55,53	1.199.861.791
40	82,11	71,57	4.516.501.913	87,35	74,41	759.598.878
41	88,52	96,63	6.048.273.095	74,30	76,65	2.024.595.185
42	65,84	52,5	6.397.853.396	90,52	26,46	1.279.245.199
43	100,00	89,5	9.303.567.996	78,82	68,45	1.572.839.209
44	94,02	37,45	11.569.392.900	89,49	74,27	97.799.334
45	92,82	58,88	12.326.302.847	93,00	13,45	344.378.408
46	72,76	45,62	12.918.857.935	99,66	18,57	0
47	41,80	46,49	13.553.532.905	100,00	44,81	432.458.102
48	93,07	78,77	14.779.402.509	96,29	27,67	547.937.880
49	68,46	55,88	3.564.480.805	17,30	80,45	778.276.981
50	57,13	95,61	5.150.143.525	32,32	67,58	2.313.646.083
51	85,69	56,7	7.666.058.180	70,64	67,04	0
52	71,91	12,8	7.587.623.103	88,60	71,59	3.382.482.795
53	50,06	39,8	8.552.828.785	86,27	36,46	3.252.533.017
54	64,50	85,83	12.203.046.680	75,97	28,29	1.545.261.966

55	58,52	43,6	13.523.680.710	78,90	60,11	5.282.982.472
56	50,28	7,58	12.093.891.440	96,93	43,16	4.584.105.865
57	64,50	28,48	15.074.047.130	86,19	84,94	3.538.025.978
58	50,15	11,38	17.968.875.480	81,88	61,40	5.581.065.064
59	61,11	99,42	19.693.908.130	82,15	40,95	4.290.527.247
60	100,00	97,21	20.631.626.250	91,60	78,41	1.733.234.736

Lampiran 3

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Dev.
Kinerja Keuangan (Y)	60	30,76	100,00	73,86	18,03
Perencanaan Anggaran (X1)	60	7,46	99,42	48,10	25,50
Anggaran Kas (X2)	60	0,00	20.631.626.250	7.358.071.084	5.152.340.207
Penyerapan Anggaran (X3)	60	0,00	100,00	73,38	28,84
Penilaian Kinerja (X4)	60	10,37	85,29	53,75	23,11
Pengembalian Anggaran (X5)	60	0,00	5.581.065.064	1.081.784.745	1.460.943.901

Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,079	60	,200*	,964	60	,073

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	56,077	8,789		6,381	,000		
renc_angg	,275	,086	,390	3,188	,002	,949	1,054
angg_kas	-1,432E-9	,000	-,409	-2,779	,007	,653	1,530
serapan_angg	,201	,089	,322	2,273	,027	,706	1,416
pnilai_knrja	,004	,095	,006	,046	,964	,949	1,054
SILPA	1,857E-10	,000	,025	,198	,843	,928	1,077

a. Dependent Variable: kinerja_keu

Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Uji Glejser*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,098	4,558		2,654	,010
	renc_angg	,017	,045	,049	,382	,704
	angg_kas	2,385E-10	,000	,137	,892	,376
	serapan_angg	,051	,046	,164	1,110	,272
	pnilai_knrja	-,099	,049	-,254	-1,993	,051
	SILPA	-7,005E-10	,000	-,186	-1,443	,155

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin-Watson*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,485 ^a	,235	,164	16,48780	2,179

a. Predictors: (Constant), SILPA, pnilai_knrja, renc_angg, serapan_angg, angg_kas

b. Dependent Variable: kinerja_keu

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	56,077	8,789		6,381	,000		
	renc_angg	,275	,086	,390	3,188	,002	,949	1,054
	angg_kas	-1,432E-9	,000	-,409	-2,779	,007	,653	1,530
	serapan_angg	,201	,089	,322	2,273	,027	,706	1,416
	pnilai_knrja	,004	,095	,006	,046	,964	,949	1,054
	SILPA	1,857E-10	,000	,025	,198	,843	,928	1,077

a. Dependent Variable: kinerja_keu

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4503,338	5	900,668	3,313	,011 ^b
	Residual	14679,763	54	271,847		
	Total	19183,101	59			

a. Dependent Variable: kinerja_keu

b. Predictors: (Constant), SILPA, pnilai_knrja, renc_angg, serapan_angg, angg_kas

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	56,077	8,789		6,381	,000	38,457	73,697
	renc_angg	,275	,086	,390	3,188	,002	,102	,449
	angg_kas	-1,432E-9	,000	-,409	-2,779	,007	,000	,000
	serapan_angg	,201	,089	,322	2,273	,027	,024	,379
	pnilai_knrja	,004	,095	,006	,046	,964	-,187	,196
	SILPA	1,857E-10	,000	,025	,198	,843	,000	,000

a. Dependent Variable: kinerja_keu

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

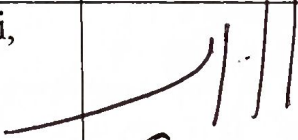
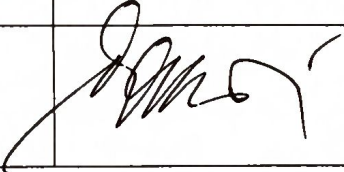
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,485 ^a	,235	,164	16,48780	2,179

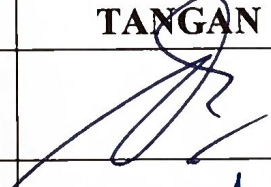
a. Predictors: (Constant), SILPA, pnilai_knrja, renc_angg, serapan_angg, angg_kas

b. Dependent Variable: kinerja_keu

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

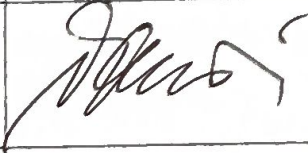
Nama : Sudarminingsih
NPM : 2024P20059
Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan Di Kecamatan Serengan Kota
Surakarta Berdasarkan Tahun Anggaran 2021 - 2025

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Kartika Hendra Ts, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA. (Pembimbing 1)		20/Agust . 2026
Dr. Supawi Pawenang, S.E., M.M. (Pembimbing 2)		21/8 2026

DISAHKAN PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Suhendro, S.E, Ak, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi)		21/8-2026
Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M. (Ka.Prodi Magister Manajemen)		21-8-2026
Tanggal Lulus	12 Agustus 2026	
Nomor Register	4038/KPTS/UT/MM UNIBA/VIII/2026	

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : Sudarminingsih
NPM : 2024P20059
Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan di Kecamatan Serengan Kota
Surakarta Berdasarkan Tahun Anggaran 2021 - 2025

TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA		
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Kartika Hendra Ts, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA. (Penguji 1)		20 Agustus 2024
Dr. Supawi Pawenang, S.E., M.M. (Penguji 2)		21/8 2024
Dr. Hj. Sudarwati, S.E., M.M. (Penguji 3)		20-8-2026